

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: BPK Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung

## BPK Periksa BKK Pringsurat

<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/153453/bpk-periksa-bkk-pringsurat>

**SEMARANG-** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng akan memeriksa BKK Pringsurat Temanggung awal 2019. Hal itu berkaitan dengan dugaan aliran dana miliaran rupiah yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal terdapat penyertaan modal dari Pemprov Jateng serta kabupaten.

Kepala Perwakilan BPK Jateng Hery Subowo mengatakan, karena ada penyertaan modal tersebut pihaknya melakukan pemeriksaan. Lantaran berkaitan dengan tata kelola keuangan BKK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jateng maupun kabupaten. Meski demikian, Hery belum bisa menjelaskan apakah bentuk pemeriksannya itu berupa pemeriksaan khusus atau diawali dengan pemeriksaan laporan keuangan. "Kalau sudah jadi bahan permasalahan, kami pahami dan akan kami periksa. Sebentar lagi, kami akan melakukan (tahap) pemeriksaan pada Januari- Februari 2019," kata Hery.

Sebagai pintu masuk pemeriksaan, pihaknya mengarahkan pada tata kelola BKK terhadap laporan keuangan daerah, baik laporan keuangan tingkat provinsi maupun kabupaten. Pihaknya tidak bisa melakukan pemeriksaan pada Semester kedua 2018, karena saat ini sudah merampungkan pemeriksaan kinerja, seperti pengawasan dan penggunaan dana desa, manajemen JKN, serta pendidikan dan tata kelola pasar tradisional. "Nanti akan ditindaklanjuti semester I 2019 saat memeriksa Laporan Keuangan 2018. Itu akan kami kaitkan," lanjutnya.

### Banyak Permasalahan

Terkait dana desa, BPK juga menemukan banyak permasalahan dalam tata kelola penggunaan pada pemeriksaan Semester II 2018. Tak hanya pemeriksaan pada pemerintah desa, BPK juga menelusuri SKPD terkait yang berfungsi melakukan pengawasan dan pembinaan desa. BPK Jateng telah terjun ke delapan kabupaten, di antaranya Grobogan, Pati, Kudus, Banyumas, Kebumen, Cilacap, dan Sukoharjo.

Pengelolaan BKK Pringsurat menjadi sorotan lantaran banyak nasabah tidak bisa menarik dana. Jika bisa, nominalnya lebih kecil dari yang akan diambil. Pertengahan November 2018, Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Temanggung menggeledah kantor pusat BKK Pringsurat Temanggung, di Jalan Hayam Wuruk Maron, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Temanggung.

Pihak Kejari menelusuri aliran dana Rp 121 miliar yang tak jelas dan tanpa pertanggungjawaban. Indikasi penyimpangan berasal dari hasil laporan tim penyidik. BKK menyebut ada dana Rp 123 miliar, namun berdasar kas per 31 Desember 2017 hanya tersisa Rp 1,8 miliar, jadi kurang lebih Rp 121 miliar tanpa pertanggungjawaban. (H81-41)